

KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI PADA BULAN RAMADHAN

**(Studi Implementasi SK Walikota No. 74/2001 di lokalisasi
Bangunsari Surabaya)**

SKRIPSI



44
Fis. S. 10/05
Tan
k

Oleh :

**WILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PUSPITA RATNA YANTI
NPM : 079514924**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengambil tema Kebijakan Penutupan Lokalisasi pada bulan Ramadhan, dalam hal ini kebijakannya adalah SK Walikota no. 74/2001 tentang pengaturan jam operasional hiburan umum pada bulan Ramadhan dan malam hari raya Idul Fitri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SK ini di lapangan dan sekaligus menjawab dampak yang ditimbulkan pada pekerja seks serta mekanisme resistensi yang dibangun.

Kerangka teori yang digunakan secara umum mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward yang mengandung komponen disposisi, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan kelompok sasaran. Teori ini coba dipertemukan dengan gagasan Johan Galtung tentang konsep kekuasaan dan kekerasan. Penelitian ini mengambil setting di lokalisasi Bangunsari, di mana lokalisasi tersebut menjadi salah satu obyek dari SK Walikota no. 74/2001. Sedangkan subyek penelitian adalah para pembuat dan pelaksana kebijakan dan juga para pekerja seks. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan pengamatan lapangan secara langsung.

Dari hasil pengolahan data di lapangan, terungkap bahwa maksud dibalik penyusunan kebijakan ini adalah lebih pada penghormatan terhadap salah satu pemeluk agama yang arahnya cenderung mengesampingkan keberadaan elemen masyarakat lain, dalam hal ini adalah pekerja seks. Artinya kebijakan ini bernuansa diskriminatif dan agak dipaksakan demi terwujudnya situasi yang kondusif untuk berpuasa. Beberapa komponen yang tidak dipenuhi dalam implementasi ini antara lain, tidak adanya pembentukan organisasi pelaksana baru, tidak ada prosedur standar pelaksanaan, tidak ada pelibatan unsur kelompok sasaran dalam penyusunan kebijakan, tidak maksimalnya sosialisasi pada kelompok sasaran, tidak adanya dana yang cukup untuk menindaklanjuti akibat pada kelompok sasaran dan tidak adanya data/informasi yang cukup untuk penyusunan sebuah kebijakan sebelum diterapkan. Dampak yang terjadi pada pekerja seks antara lain, penghasilan menurun bahkan tidak ada, keluarga di kampung tidak dikirim uang, utang menumpuk, biaya sehari-hari harus berutang dan secara psikologis selalu mengalami ketakutan.

Mekanisme resistensi yang dibangun antara lain tetap bekerja di wisma secara sembunyi-sembunyi, mencari tempat kos untuk tetap bekerja, menghindari tukang kredit, mencari tamu di Pelabuhan Tanjung Perak dan melakukan demonstrasi agar keuhannya didengar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Halaman Pengesahan

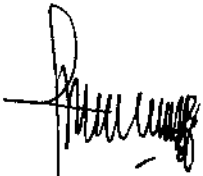
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 6 Juni 2003
dengan susunan Tim Penguji

Ketua



Drs. Herwanto AM, MA
NIP. 130701137

Anggota



Drs. Sutinah, MS
NIP. 131125985

Anggota



Drs. Sudarso, Msi
NIP. 132014462